

JEJARING KEBIJAKAN DALAM PROGRAM TPS3R TANGINAS BEDAS (STUDI PADA DESA CANGKUANG WETAN KABUPATEN BANDUNG)

Edelwais Rinjani¹, Bonti²

^{1,2}Program Studi Administrasi Keuangan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Padjadjaran, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat
Email Korespondensi : edelwais22001@mail.unpad.ac.id¹, bonti@unpad.ac.id²

Submitted: 23-01-2026; Accepted: 11-04-2026; Published : 27-04-2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika jejaring kebijakan dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah berbasis *reduce, reuse, recycle* di Desa Cangkuang Wetan, Kabupaten Bandung, dengan menekankan pada permasalahan efektivitas jejaring antaraktor. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, serta dianalisis secara sistematis menggunakan perangkat lunak pengolah data kualitatif untuk memetakan relasi dan interaksi antaraktor dalam jejaring kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jejaring kebijakan yang terbentuk cenderung bersifat sentralistik dengan dominasi pemerintah desa sebagai aktor kunci, yang berdampak pada tingginya ketergantungan dalam pengambilan keputusan dan keberlanjutan program. Selain itu, efektivitas jejaring dipengaruhi oleh belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah, keterbatasan mekanisme pendanaan yang berkelanjutan, serta belum meratanya distribusi peran dan sumber daya antaraktor. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kualitas jejaring kebijakan menjadi faktor penentu dalam keberhasilan implementasi program pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan pendanaan, pemerataan distribusi kewenangan, serta peningkatan partisipasi masyarakat sebagai prasyarat utama dalam membangun jejaring kebijakan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan di tingkat lokal.

Kata kunci: Jejaring Kebijakan, Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat, Pemerintah Desa

ABSTRACT

This study aims to analyze the dynamics of policy networks in the implementation of a community-based waste management program based on reduce, reuse, and recycle principles in Cangkuang Wetan Village, Bandung Regency, with a particular focus on network effectiveness among actors. This research employs a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis, and were systematically analyzed using qualitative data analysis software to map relationships and interactions among actors within the policy network. The findings reveal that the policy network tends to be centralized, with the village government acting as the dominant actor, resulting in a high level of dependency in decision-making processes and program sustainability. In addition, network effectiveness is influenced by suboptimal community participation in waste sorting, limited sustainable funding mechanisms, and uneven distribution of roles and resources among actors. This study concludes that the quality of policy networks is a key determinant of the success of community-based waste management programs. The findings highlight the importance of strengthening institutional capacity, ensuring a more balanced distribution of authority, and enhancing community participation as essential prerequisites for developing more effective, inclusive, and sustainable policy networks at the local level.

Key word: Policy Network, Community-Based Waste Management, Village Government

PENDAHULUAN

Permasalahan pengelolaan sampah rumah tangga masih menjadi tantangan serius di berbagai wilayah perkotaan dan peri-urban di Indonesia. Pertumbuhan penduduk, perubahan pola konsumsi, serta meningkatnya aktivitas ekonomi telah menyebabkan peningkatan timbulan sampah yang signifikan (Hossain *et al.*, 2024). Kondisi ini tidak selalu diimbangi dengan kapasitas pengelolaan sampah yang memadai, baik dari sisi infrastruktur, kelembagaan, maupun partisipasi masyarakat. Akibatnya, persoalan sampah tidak hanya berdampak pada degradasi lingkungan, tetapi juga menimbulkan risiko kesehatan masyarakat serta tekanan sosial dan ekonomi di tingkat lokal.

Meskipun terdapat inisiatif komunitas yang tersebar dalam pengelolaan sampah padat, jumlah sampah rumah tangga di seluruh dunia terus meningkat (Aprilia, 2021). Pemerintah Indonesia merespons persoalan tersebut melalui perubahan paradigma kebijakan pengelolaan sampah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-undang ini menegaskan pergeseran pendekatan dari sistem kumpul–angkut–buang menuju pengelolaan sampah berbasis pengurangan dari sumber, penggunaan kembali, dan daur ulang. Salah satu implementasi konkret dari kebijakan tersebut adalah pengembangan Program Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R), yang dirancang sebagai instrumen pengelolaan sampah berbasis masyarakat di tingkat lokal.

Dokumen kebijakan dan regulasi yang menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan Program TPS3R Tanginas Bedas meliputi kebijakan nasional, daerah, hingga desa, yang mengatur pengelolaan sampah rumah tangga serta penguatan kelembagaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Regulasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif, tetapi juga membentuk kerangka interaksi antaraktor dalam jejaring kebijakan, termasuk dalam pembagian peran, kewenangan, dan mekanisme koordinasi. Selain itu, dokumen operasional seperti surat keputusan pembentukan kelembagaan TPS3R, laporan kegiatan, dan data bank sampah menjadi instrumen pendukung dalam pelaksanaan dan evaluasi program di tingkat lokal.

Program TPS3R pada dasarnya tidak hanya merupakan solusi teknis untuk mengurangi beban tempat pemrosesan akhir (TPA), tetapi juga merupakan kebijakan publik yang menuntut kolaborasi lintas aktor dan lintas level pemerintahan. Pelaksanaan TPS3R melibatkan pemerintah pusat sebagai perumus kebijakan makro, pemerintah daerah sebagai pelaksana dan pembina teknis, pemerintah desa sebagai penggerak utama di tingkat lokal, serta aktor non-pemerintah seperti masyarakat, pengelola TPS3R, akademisi, dan badan usaha. Dengan demikian, keberhasilan TPS3R sangat bergantung pada bagaimana relasi, interaksi, dan pembagian peran antaraktor tersebut terbangun dalam suatu jejaring kebijakan.

Dalam perspektif kebijakan publik kontemporer, kondisi ini menunjukkan bahwa TPS3R merupakan kebijakan yang tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui pendekatan hierarkis semata (Yohanes *et al.*, 2025). Sebaliknya, TPS3R lebih tepat dipahami sebagai kebijakan berbasis jejaring (*policy network*), di mana proses perumusan, implementasi, dan keberlanjutan kebijakan dipengaruhi oleh hubungan saling ketergantungan antaraktor yang memiliki sumber daya, kepentingan, dan kapasitas yang berbeda. Oleh karena itu, analisis terhadap jejaring kebijakan menjadi penting untuk memahami dinamika pelaksanaan TPS3R secara lebih komprehensif.

Dalam penelitian ini, pemahaman terhadap jejaring kebijakan TPS3R diperoleh melalui penelusuran mendalam atas peran dan interaksi para aktor yang terlibat, meliputi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung, Pemerintah Kecamatan Dayeuhkolot, dan Pemerintah Desa Canguang Wetan dari unsur pemerintah, kemudian dari unsur pelaksana teknis, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengungkap dinamika kewenangan, pola koordinasi, hubungan kekuasaan, serta strategi aktor dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Canguang Wetan, sehingga memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana jejaring kebijakan bekerja dalam mendukung implementasi Program TPS3R.

Dalam konteks tersebut, teori jejaring kebijakan van Waarden (1992) menjadi kerangka analitis yang relevan untuk memahami dinamika pelaksanaan TPS3R. van Waarden

memandang jejaring kebijakan sebagai hubungan antaraktor yang mencakup aspek aktor, fungsi, struktur, kelembagaan, aturan bertindak, hubungan kekuasaan, dan strategi aktor. Melalui kerangka ini, penelitian berfokus pada bagaimana interaksi antaraktor, distribusi peran dan sumber daya, serta pola koordinasi dalam jejaring memengaruhi efektivitas pelaksanaan program TPS3R di tingkat lokal.

Desa Cangkuang Wetan, Kabupaten Bandung, menjadi contoh empiris yang menarik karena berhasil mengembangkan Program TPS3R Tanginas Bedas. Program ini menunjukkan capaian positif dalam pengolahan sampah berbasis masyarakat dan inovasi pengelolaan di tingkat desa. Lebih lanjut, studi kasus ini memberikan kontribusi terhadap literatur jejaring kebijakan dengan menunjukkan bahwa dinamika jejaring di tingkat lokal tidak hanya dipengaruhi oleh keberagaman aktor, tetapi juga oleh distribusi kekuasaan, ketergantungan sumber daya, serta kapasitas kelembagaan dalam mengelola kolaborasi (Leeuwen & Surya, 2024).

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat tidak hanya mampu mengatasi persoalan sampah di tingkat desa, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap upaya nasional dalam menjaga kualitas lingkungan serta menghadapi tantangan global berupa perubahan iklim (Ismail *et al.*, 2025). Selain itu, temuan penelitian ini mempertegas bahwa keberhasilan pengelolaan sampah berbasis masyarakat sangat bergantung pada tingkat partisipasi publik serta efektivitas koordinasi antaraktor dalam jejaring kebijakan (Pambudi *et al.*, 2025). Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis pengelolaan, tetapi juga oleh kapasitas jejaring dalam membangun kolaborasi yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

TPS3R Tanginas Bedas dipilih sebagai objek penelitian karena beberapa pertimbangan strategis yang menjadi fokus penelitian tersebut, yaitu a) Program ini telah mendapatkan pengakuan sebagai desa percontohan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Menurut laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung (2023), TPS3R Tanginas Bedas berhasil mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA hingga 40% dan menghasilkan produk daur ulang yang memiliki nilai ekonomi; b) Keberhasilan TPS3R sangat

bergantung pada aspek kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Secara kelembagaan, TPS3R idealnya dikelola oleh lembaga yang sah dan berkelanjutan, seringkali berada di bawah naungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang berbadan hukum (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2018); c) Program ini melibatkan aktor yang dapat diidentifikasi dengan jelas, meliputi: Pemerintah Desa Cangkuang Wetan, Pemerintah Kecamatan Dayeuhkolot, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, RT/RW Desa Cangkuang Wetan, kelompok pengelola TPS3R, serta masyarakat setempat; d) TPS3R Tanginas Bedas menggunakan teknologi tepat guna seperti mesin pencacah sampah organik (Motah), unit pengomposan, dan sistem bank sampah yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Inovasi ini lahir dari proses kolaborasi antaraktor dalam jejaring kebijakan di tingkat desa.

Namun, di balik capaian tersebut, terdapat sejumlah indikasi masalah yang mencerminkan dinamika jejaring kebijakan yang belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini tidak hanya menunjukkan keterbatasan pada aspek implementasi, tetapi juga merefleksikan berbagai isu kontemporer dalam jejaring, khususnya terkait asimetri kekuasaan, ketergantungan sumber daya, serta hambatan sosial budaya yang memengaruhi efektivitas interaksi antaraktor.

Keberlanjutan operasional TPS3R masih sangat bergantung pada bantuan anggaran dari pemerintah kabupaten dan provinsi, bahkan dalam kondisi tertentu turut ditopang oleh sumber daya pribadi Kepala Desa. Fenomena ini mengindikasikan lemahnya kelembagaan dalam aspek pendanaan, serta tingginya tingkat ketergantungan finansial terhadap aktor kunci dalam jejaring. Dalam perspektif tata kelola jejaring, kondisi tersebut mencerminkan belum terbentuknya mekanisme distribusi sumber daya yang otonom dan berkelanjutan, sehingga meningkatkan kerentanan program terhadap perubahan konteks politik dan fiskal.

Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah dari sumber belum mencapai tingkat yang diharapkan, yang mengindikasikan bahwa fungsi jejaring dalam aspek edukasi, mobilisasi, dan internalisasi nilai belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa

upaya perubahan perilaku masyarakat masih menghadapi keterbatasan, khususnya dalam membangun kesadaran dan komitmen kolektif terhadap pengelolaan sampah berbasis sumber. Temuan ini sejalan dengan studi Mulyana *et al.* (2022) yang menegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat ditentukan oleh keberlanjutan pendidikan nonformal sebagai sarana peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan kapasitas masyarakat.

Lebih lanjut, kondisi ini juga mencerminkan adanya hambatan sosial budaya, seperti rendahnya kesadaran ekologis, resistensi terhadap perubahan perilaku, serta masih mengakarnya praktik pengelolaan sampah konvensional. Dengan demikian, efektivitas jejaring tidak hanya ditentukan oleh desain kelembagaan, tetapi juga oleh kemampuan aktor dalam mentransformasikan norma dan praktik sosial di tingkat masyarakat.

Selain itu, dominasi peran Kepala Desa dalam pengambilan keputusan strategis menunjukkan adanya konsentrasi kekuasaan yang tinggi dalam jejaring, yang berimplikasi pada terbatasnya ruang partisipasi aktor lain dalam proses deliberasi kebijakan. Akibatnya, *shared responsibility* dan *mutual interdependence* belum sepenuhnya terwujud dalam praktik jejaring kebijakan TPS3R.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, literatur terkait pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Indonesia masih didominasi oleh pembahasan aspek teknis operasional, pemberdayaan masyarakat, dan strategi internal pengelolaan. Namun demikian, kajian yang menganalisis dinamika jejaring kebijakan dalam implementasi program pengelolaan sampah di tingkat lokal masih relatif terbatas. Temuan ini juga diperkuat melalui penelusuran literatur berbasis bibliometrik menggunakan VOSviewer yang menunjukkan bahwa kajian mengenai jejaring kebijakan dalam konteks pengelolaan sampah berbasis masyarakat masih relatif terbatas. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) dalam memahami relasi antaraktor, distribusi kekuasaan, serta mekanisme koordinasi dalam jejaring kebijakan.

Penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan mengkaji jejaring kebijakan dalam implementasi program TPS3R Tanginas Bedas secara lebih komprehensif melalui

analisis konfigurasi aktor, struktur jejaring, hubungan kekuasaan, serta tingkat pelembagaan dalam konteks lokal desa. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, studi ini menempatkan jejaring kebijakan sebagai fokus utama untuk menjelaskan bagaimana interaksi dan ketergantungan antaraktor memengaruhi efektivitas dan keberlanjutan program.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jejaring kebijakan dalam pelaksanaan Program TPS3R Tanginas Bedas di Desa Cangkuang Wetan. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur kebijakan publik, khususnya terkait implementasi kebijakan berbasis jejaring di tingkat lokal, serta menjadi dasar dalam merumuskan strategi penguatan kelembagaan, peningkatan partisipasi, dan pengembangan kolaborasi antaraktor dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam tentang dinamika jejaring kebijakan dalam pelaksanaan Program Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R) Tanginas Bedas di Desa Cangkuang Wetan, Kabupaten Bandung. Desain studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mempelajari secara mendalam interaksi antar pihak, pola hubungan, serta bagaimana peran dan kekuasaan tersebar dalam situasi yang spesifik dan rumit (Ridder, 2017). Dengan demikian, pendekatan ini sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin menganalisis secara mendalam tentang susunan jaringan kebijakan dan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat keefektifan serta kelanjutan program di tingkat daerah.

Pendekatan kualitatif dipandang tepat karena penelitian ini berfokus pada relasi antaraktor, proses interaksi, distribusi peran, serta mekanisme kebijakan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif semata, melainkan perlu dipahami melalui konteks, makna, dan praktik kebijakan di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi.

Analisis data dilakukan secara bertahap menggunakan perangkat lunak NVivo, yang berfungsi untuk mengelola, mengodekan, dan

memetakan data kualitatif secara sistematis. Proses analisis diawali dengan transkripsi hasil wawancara, kemudian dilanjutkan dengan open coding, yaitu pemberian kode awal terhadap pernyataan informan yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya dilakukan pengelompokan kode-kode tersebut ke dalam kategori dan subkategori yang mengacu pada dimensi teori jejaring kebijakan van Waarden (1992), yaitu aktor, fungsi, struktur, kelembagaan, aturan bertindak, hubungan kekuasaan, dan strategi aktor. Melalui NVivo, peneliti juga menyusun project map untuk memvisualisasikan hubungan antara aktor, fungsi, dan kebijakan, sehingga pola jejaring dapat dianalisis secara lebih komprehensif dan transparan.

Penelitian ini melibatkan tujuh informan kunci yang dipilih secara purposive berdasarkan tingkat keterlibatan, pengetahuan, serta peran strategis dalam jejaring kebijakan TPS3R Tanginas Bedas. Informan tersebut merepresentasikan aktor lintas sektor dan lintas level pemerintahan, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, pengelola TPS3R, akademisi, Karang Taruna, serta pengelola Bank Sampah. Kriteria pemilihan informan didasarkan pada keterlibatan langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan program, serta kemampuan memberikan informasi yang relevan dan mendalam mengenai dinamika jejaring kebijakan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi untuk memperoleh data yang komprehensif dan kontekstual. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui penyusunan pedoman wawancara untuk menjaga konsistensi pertanyaan, serta pencatatan dan dokumentasi data lapangan secara rinci. Selanjutnya, analisis data dilakukan secara bertahap menggunakan model Miles *et al.* (2014), yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Seluruh data dianalisis dengan bantuan perangkat lunak NVivo 12 melalui tahapan transkripsi, *open coding*, kategorisasi, dan pemetaan hubungan antaraktor berdasarkan dimensi teori jejaring kebijakan, sehingga memungkinkan identifikasi

pola relasi, distribusi kekuasaan, dan struktur jejaring secara sistematis.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan hasil wawancara antar informan, hasil observasi lapangan, serta temuan dari dokumen kebijakan. Selain itu, untuk meminimalisir potensi bias, peneliti melakukan *cross check* antar sumber data, melakukan klarifikasi ulang kepada informan (*member checking*), serta menjaga objektivitas melalui reflektivitas peneliti selama proses pengumpulan dan analisis data. Penggunaan NVivo juga mendukung reliabilitas analisis melalui sistem pengodean yang terstruktur dan terdokumentasi, sehingga proses analisis dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan secara akademis. Dengan demikian, metode penelitian ini dirancang untuk menghasilkan analisis jejaring kebijakan TPS3R Tanginas Bedas yang komprehensif, sistematis, dan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program TPS3R Tanginas Bedas memiliki tujuan strategis untuk menyelesaikan permasalahan sampah di tingkat desa melalui penerapan konsep *zero waste*, mengurangi ketergantungan terhadap Tempat Pembuangan Akhir (TPA), serta mendorong pengelolaan sampah dari sumbernya. Program ini juga bertujuan mengubah sampah menjadi sumber daya ekonomi melalui penerapan ekonomi sirkular, menciptakan lingkungan desa yang bersih dan sehat sebagai bagian dari Program Kampung Bedas, serta menjadi model pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang dapat direplikasi oleh desa lain.

Penelitian ini menganalisis jejaring kebijakan dalam pelaksanaan Program TPS3R Tanginas Bedas di Desa Canguang Wetan dengan menggunakan kerangka teori jejaring kebijakan van Waarden (1992). Perangkat lunak NVivo 12 digunakan untuk melakukan analisis data secara sistematis. Pada tahap awal, data, yang terdiri dari transkrip wawancara, catatan observasi, dan dokumen kebijakan, dimasukkan ke dalam proyek NVivo sebagai sumber. Kemudian, proses pengodean awal, dilakukan dengan mengidentifikasi unit makna dari data

dan mengelompokkannya ke dalam node untuk menunjukkan tema atau konsep tertentu.

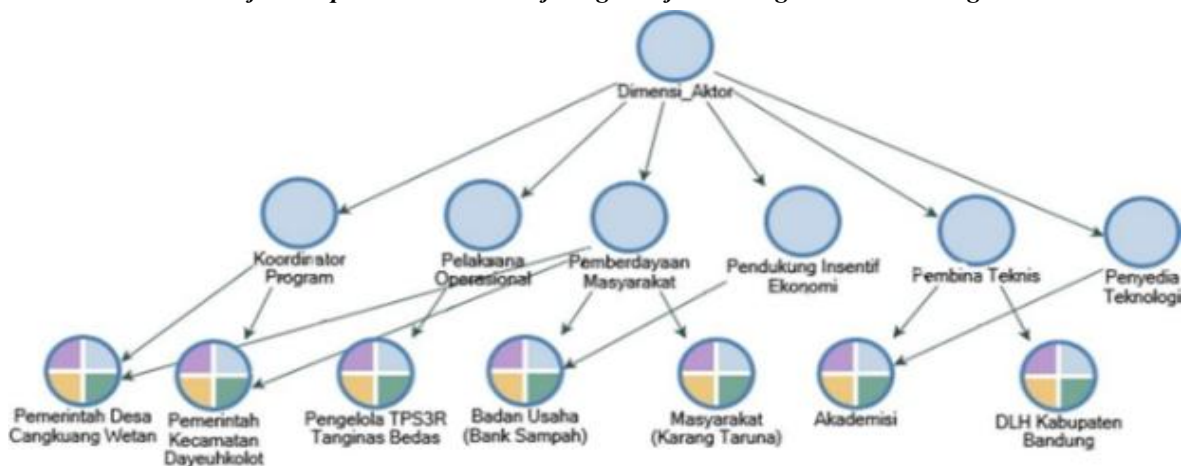
Pada tahap berikutnya, proses kategorisasi dilakukan dengan mengorganisasi dan menghubungkan berbagai node ke dalam kategori analisis yang lebih terstruktur. Kategori ini mencakup relasi antaraktor, fungsi jejaring, struktur, pelebagaan, aturan bertindak, distribusi kekuasaan, dan strategi aktor. Cases juga digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan aktor atau informan, yang memungkinkan analisis komparatif antaraktor dalam jejaring kebijakan. Pada tahap akhir, visualisasi data dibuat menggunakan fitur mapping NVivo, seperti project map atau network map, untuk menunjukkan pola hubungan, interaksi, dan posisi antaraktor dalam jejaring kebijakan. Penelitian ini menggunakan NVivo untuk meningkatkan transparansi,

konsistensi, dan keterlacakan proses analisis, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

1. Aktor (Actors)

Dimensi aktor dalam jejaring kebijakan Program TPS3R Tanginas Bedas menunjukkan keterlibatan berbagai aktor lintas sektor dan lintas level pemerintahan, sebagaimana dikemukakan oleh van Waarden (1992). Jejaring ini melibatkan aktor pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa; aktor pelaksana teknis; masyarakat; akademisi; serta badan usaha. Keterlibatan multi-aktor tersebut sejalan dengan kerangka kebijakan nasional pengelolaan sampah yang menempatkan pengelolaan sampah sebagai tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat (Pramuji, 2025).

Gambar 1. Project Map Dimensi Aktor Jejaring Kebijakan Program TPS3R Tanginas Bedas



Sumber: Diolah Penulis (2025)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Canguang Wetan menempati posisi sebagai aktor sentral sekaligus *lead actor* dalam jejaring kebijakan TPS3R. Hal ini tercermin dari intensitas keterlibatan dalam hampir seluruh proses kebijakan, mulai dari inisiasi program, pengambilan keputusan strategis, hingga pengendalian operasional, sebagaimana teridentifikasi dalam hasil wawancara dan pemetaan NVivo yang menunjukkan frekuensi interaksi dan rujukan aktor yang paling dominan. Peran ini didukung oleh kewenangan formal, legitimasi regulatif, serta akses terhadap sumber daya administratif dan politik. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung berperan sebagai

pembina teknis yang memberikan dukungan berupa pelatihan, fasilitasi sarana, dan pendampingan operasional, sedangkan Pemerintah Kecamatan Dayeuhkolot menjalankan fungsi koordinatif melalui fasilitasi komunikasi antarlevel pemerintahan.

Pada tingkat implementasi, pengelola TPS3R Tanginas Bedas menjadi aktor kunci operasional dengan tingkat keterlibatan paling tinggi dalam pengelolaan teknis sehari-hari, seperti pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah. Peran ini ditunjukkan melalui intensitas aktivitas harian serta kedekatan langsung dengan proses operasional program. Aktor non-pemerintah lainnya, seperti Universitas Pasundan, berkontribusi dalam

bentuk dukungan pengetahuan dan teknologi, yang tercermin dari keterlibatan dalam pelatihan, pendampingan, dan pengembangan inovasi pengelolaan sampah. Bank Sampah berperan sebagai aktor ekonomi-sosial yang mendorong partisipasi masyarakat, terlihat dari mekanisme insentif berbasis tabungan sampah yang meningkatkan keterlibatan warga.

Aktor masyarakat, termasuk RT/RW, Karang Taruna, dan warga, menunjukkan tingkat partisipasi yang relatif tinggi pada tahap implementasi, khususnya dalam kegiatan pemilahan dan pengumpulan sampah. Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan strategis masih terbatas, yang mengindikasikan adanya kesenjangan antara partisipasi operasional dan pengaruh dalam kebijakan.

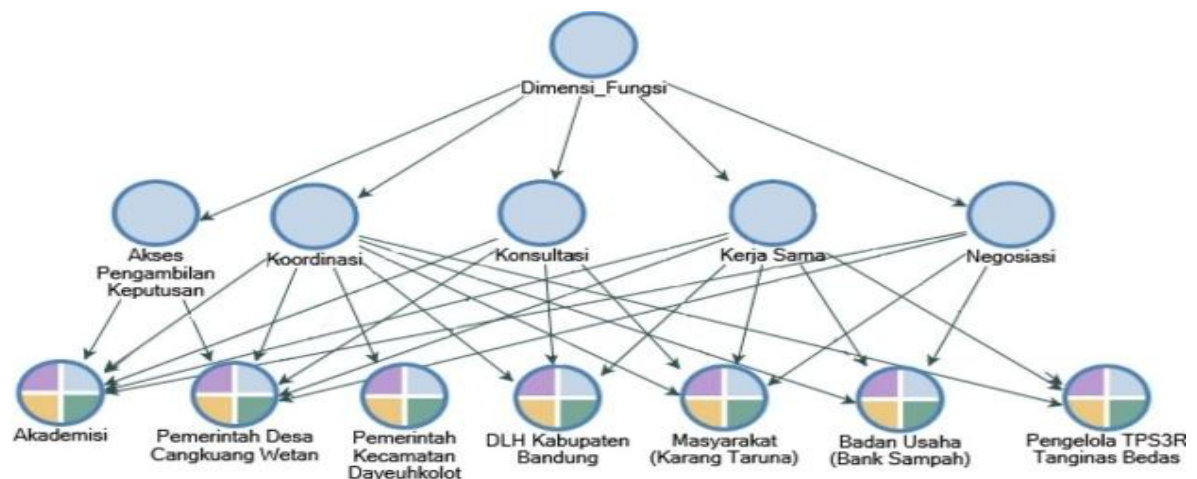
Secara keseluruhan, jejaring kebijakan TPS3R Tanginas Bedas dapat dikategorikan sebagai jejaring multi-aktor yang bersifat asimetris. Meskipun melibatkan banyak aktor non-pemerintah, kewenangan strategis tetap terkonsentrasi pada pemerintah desa, sementara aktor masyarakat lebih dominan pada tahap pelaksanaan. Temuan ini menegaskan bahwa banyaknya aktor dalam jejaring tidak secara

otomatis menciptakan distribusi kekuasaan yang setara, sebagaimana juga dikemukakan oleh (Rhodes, 2007).

2. Fungsi (*Function*)

Dimensi fungsi jejaring kebijakan TPS3R Tanginas Bedas menunjukkan bahwa jejaring berfungsi sebagai sarana koordinasi, komunikasi, kerja sama, konsultasi, dan negosiasi antaraktor yang saling bergantung, sebagaimana dikemukakan van Waarden (1992). Dalam jejaring kebijakan TPS3R Tanginas Bedas, aktor pemerintah, non-pemerintah, dan masyarakat menjalankan fungsi yang saling melengkapi sesuai kapasitas dan kewenangannya. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung berperan pada level kebijakan melalui fungsi koordinasi dan konsultasi teknis, yang secara empiris tercermin dalam kegiatan pembinaan, pelatihan pengelolaan sampah, serta fasilitasi bantuan sarana prasarana kepada pengelola TPS3R. Pemerintah kecamatan berfungsi sebagai penghubung antara kabupaten dan desa, yang terlihat dari perannya dalam memfasilitasi sosialisasi program dan koordinasi lintas sektor melalui forum pertemuan tingkat kecamatan.

Gambar 2. Project Map Dimensi Fungsi Jejaring Kebijakan Program TPS3R Tanginas Bedas



Sumber: Diolah Penulis (2025)

Pemerintah Desa Canguang Wetan, khususnya Kepala Desa, menempati posisi aktor sentral dengan peran dominan dalam pengambilan keputusan strategis dan koordinasi antaraktor. Secara empiris, hal ini tercermin dari

keterlibatan langsung dalam perencanaan program, penentuan arah kebijakan, serta inisiasi kerja sama dengan berbagai pihak. Fungsi negosiasi juga dijalankan dalam upaya memperoleh dukungan sumber daya dari

pemerintah daerah maupun mitra eksternal. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan informan yang menyatakan bahwa pemerintah desa berperan aktif dalam mengoordinasikan seluruh aktor dan menentukan arah kebijakan pengelolaan TPS3R.

Pada tingkat operasional, pengelola TPS3R berperan sebagai aktor pelaksana utama yang mengoordinasikan kegiatan teknis sehari-hari, seperti pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah, serta pencatatan keuangan. Peran ini juga tercermin dari interaksi rutin dengan masyarakat dan bank sampah dalam memastikan kelancaran operasional. Aktor non-pemerintah dari perguruan tinggi, yaitu Universitas Pasundan, berperan sebagai pendukung berbasis pengetahuan melalui fungsi konsultasi dan transfer teknologi, yang diwujudkan dalam pendampingan teknis dan pengembangan inovasi mesin insinerator.

Aktor masyarakat, seperti Karang Taruna dan warga, menjalankan fungsi koordinasi, kerja sama, dan edukasi lingkungan, yang terlihat dari keterlibatan dalam sosialisasi pemilahan sampah dan kegiatan operasional TPS3R. Sementara itu, Bank Sampah berfungsi sebagai penghimpun sampah anorganik dan pemberi insentif ekonomi, yang secara empiris tercermin dari mekanisme tabungan sampah yang mendorong partisipasi masyarakat.

Konsentrasi fungsi-fungsi kunci pada satu aktor utama menunjukkan bahwa jejaring kebijakan TPS3R belum sepenuhnya bersifat simetris, tetapi cenderung terpusat. Dalam perspektif van Waarden (1992), kondisi ini mencerminkan jejaring dengan sentralitas aktor yang kuat, di mana fungsi koordinasi dan pengambilan keputusan difokuskan pada aktor pusat. Temuan ini sejalan dengan Provan dan Kenis (2008) yang menyatakan bahwa jejaring dengan kompleksitas aktor tinggi sering kali dikelola lebih efektif melalui satu aktor pengarah utama (*lead organization*), khususnya pada konteks kebijakan publik di tingkat lokal.

Dengan demikian, secara fungsional, jejaring kebijakan TPS3R Tanginas Bedas dapat dikategorikan sebagai jejaring yang relatif efektif dalam menjalankan fungsi kebijakan, namun masih menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada aktor pusat. Analisis ini dipertegas melalui visualisasi tabel fungsi aktor yang menggambarkan distribusi fungsi, bentuk interaksi, serta posisi masing-masing aktor

dalam jejaring kebijakan.

3. Struktur (*Structure*)

Dimensi struktur dalam teori jejaring kebijakan menurut van Waarden (1992) merujuk pada pola hubungan yang terbentuk antaraktor dalam suatu jejaring kebijakan. Struktur jejaring ditentukan oleh beberapa unsur utama, yaitu jumlah anggota (*size of the network*), jenis keanggotaan (*type of membership*), batas-batas jejaring (*boundaries*), pola hubungan atau jenis koordinasi (*linking pattern/type of coordination*), serta sifat hubungan antaraktor (*nature of the relations*). Analisis terhadap dimensi ini penting untuk memahami bagaimana jejaring kebijakan Program TPS3R Tanginas Bedas bekerja secara aktual di tingkat lokal.

Dimensi struktur jejaring kebijakan TPS3R Tanginas Bedas menunjukkan pola hubungan antaraktor yang relatif kompleks namun cenderung sentralistik, dengan Pemerintah Desa Cangkuang Wetan sebagai *focal organization*. Jejaring ini melibatkan lima kelompok aktor utama, yaitu pemerintah, pengelola TPS3R, masyarakat, akademisi, dan badan usaha, dengan ukuran jejaring yang besar terutama dari unsur masyarakat. Jenis keanggotaan aktor pemerintah bersifat formal dan wajib, sedangkan aktor non-pemerintah cenderung sukarela dan lebih terbuka, sehingga menciptakan perbedaan pola relasi dan tingkat keterikatan dalam jejaring.

Pola sentralistik tersebut terbentuk melalui beberapa faktor utama. Pertama, adanya konsentrasi kewenangan formal pada pemerintah desa sebagai pemegang otoritas dalam perumusan dan pengambilan keputusan kebijakan di tingkat lokal. Kedua, ketimpangan penguasaan sumber daya, terutama dalam aspek pendanaan, akses informasi, dan legitimasi administratif, yang lebih dominan dimiliki oleh pemerintah desa. Ketiga, adanya kesenjangan kapasitas antaraktor, di mana aktor non-pemerintah memiliki keterbatasan dalam aspek manajerial, teknis, dan pengambilan keputusan strategis. Secara empiris, kondisi ini tercermin dari pola interaksi yang menunjukkan bahwa sebagian besar proses koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan terpusat pada pemerintah desa, sementara pengelola TPS3R berperan sebagai penghubung operasional dengan intensitas interaksi harian yang tinggi.

Struktur jejaring yang terpusat ini

memberikan keuntungan dalam bentuk efisiensi koordinasi dan kecepatan pengambilan keputusan dalam jangka pendek, terutama pada tahap implementasi program. Namun demikian, ketergantungan yang tinggi pada aktor pusat juga menimbulkan risiko strategis terhadap keberlanjutan jejaring. Ketergantungan ini berpotensi menyebabkan disrupsi fungsi jejaring apabila terjadi perubahan kepemimpinan, keterbatasan sumber daya, atau penurunan komitmen dari aktor utama. Selain itu, sentralisasi kewenangan dapat membatasi ruang partisipasi aktor lain dalam proses pengambilan keputusan, sehingga menghambat distribusi pengetahuan, inovasi, dan tanggung jawab secara kolektif. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan kapasitas adaptif dan resiliensi jejaring dalam menghadapi dinamika permasalahan pengelolaan sampah di tingkat lokal (Syaputra, 2025).

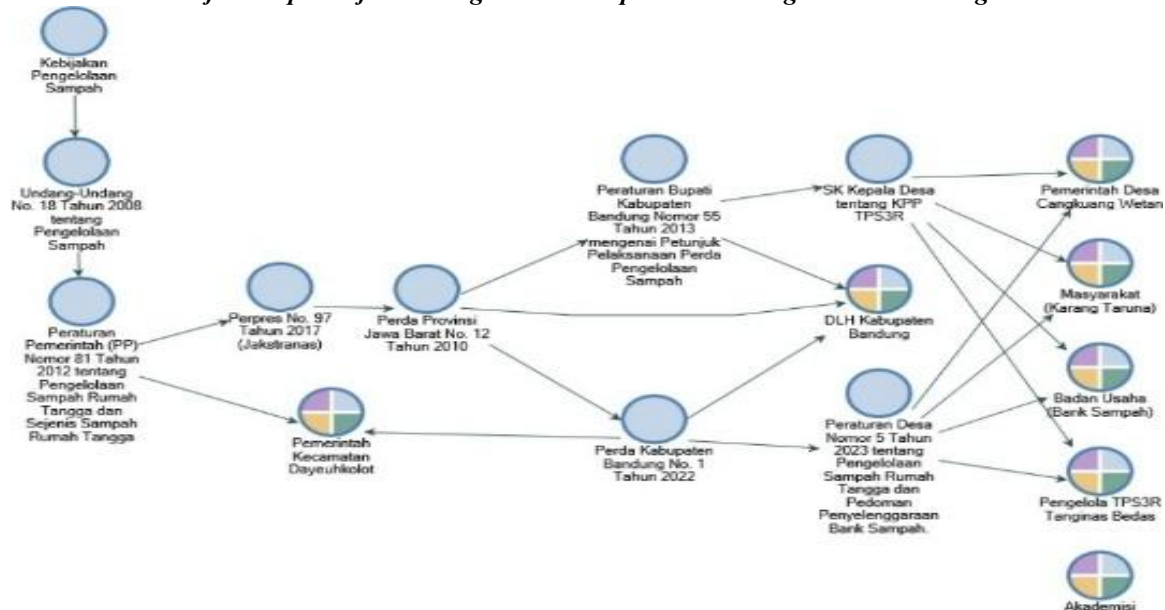
Dengan demikian, meskipun struktur jejaring kebijakan TPS3R Tanginas Bedas

mampu menjaga stabilitas koordinasi, diperlukan upaya penguatan kapasitas aktor non-pemerintah serta distribusi kewenangan yang lebih proporsional guna mengurangi ketergantungan pada aktor pusat dan meningkatkan keberlanjutan jejaring kebijakan.

4. Pelembagaan (*Institutionalization*)

Pelembagaan dalam jejaring kebijakan Program TPS3R Tanginas Bedas menunjukkan sejauh mana pola hubungan antaraktor dilembagakan ke dalam aturan formal, struktur organisasi, serta mekanisme kerja yang relatif stabil. Mengacu pada van Waarden (1992), pelembagaan dalam jejaring kebijakan mencakup keanggotaan yang bersifat wajib, keterkaitan antaraktor yang teratur, intensitas interaksi yang tinggi, serta adanya kepemimpinan yang saling terkait, di mana semakin tinggi tingkat pelembagaan tersebut maka semakin besar pula efektivitas jejaring kebijakan yang dihasilkan.

Gambar 3. Project Map Kebijakan Pengelolaan Sampah dalam Program TPS3R Tanginas Bedas



Sumber: Diolah oleh Penulis (2025)

Dimensi pelembagaan jejaring kebijakan Program TPS3R Tanginas Bedas menunjukkan bahwa jejaring telah dilembagakan secara formal dan berjenjang, mulai dari tingkat nasional hingga desa, namun belum sepenuhnya optimal secara substantif. Pelembagaan tercermin melalui keberadaan regulasi berlapis (UU, PP, Perpres, Perda, hingga Perdes),

keanggotaan wajib bagi aktor tertentu, serta peran Pemerintah Desa Cangkuang Wetan sebagai unit kebijakan pusat di tingkat lokal.

Penempatan TPS3R di bawah BUMDes memberikan legitimasi formal sekaligus integrasi dengan pendekatan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah. BUMDes berupaya meraih manfaat ekonomi dan memberikan

manfaat sosial serta non-ekonomi untuk pembangunan desa (Ultari & Khoirunurrofik, 2024). Namun demikian, posisi kelembagaan ini juga memiliki implikasi langsung terhadap operasional program. Di satu sisi, integrasi dengan BUMDes membuka peluang pengembangan unit usaha berbasis pengelolaan sampah serta akses terhadap sumber pendanaan desa. Di sisi lain, mekanisme pengelolaan keuangan yang terpusat pada BUMDes dapat membatasi fleksibilitas pengelola TPS3R dalam mengelola pendapatan operasional. Selain itu, pembagian manfaat ekonomi yang belum terdistribusi secara proporsional juga berpotensi memengaruhi motivasi dan kinerja pengelola di tingkat operasional.

Ketiadaan standar operasional prosedur (SOP) lintas aktor yang baku menjadi temuan kunci dalam pelebagaan jejaring kebijakan TPS3R Tanginas Bedas. Kondisi ini menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat pedoman formal yang mengatur secara jelas pembagian peran, alur koordinasi, serta mekanisme kerja sama antaraktor dalam jejaring. Akibatnya, proses koordinasi dan pengambilan keputusan sering berlangsung secara ad hoc dan sangat bergantung pada inisiatif serta kapasitas aktor kunci, khususnya pemerintah desa dan pengelola TPS3R.

Di sisi lain, ketiadaan SOP formal tersebut sebagian diimbangi oleh keberadaan pelebagaan informal yang berkembang melalui norma sosial, kebiasaan kerja, serta hubungan kepercayaan antaraktor dalam masyarakat. Meskipun mekanisme informal ini mampu menjaga keberlangsungan operasional dalam jangka pendek, ketergantungan pada pola interaksi non-formal berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam pelaksanaan program dan menyulitkan proses replikasi maupun pengembangan jejaring.

Secara keseluruhan, jejaring TPS3R Tanginas Bedas telah mencapai tahap pelebagaan struktural, yang ditandai oleh adanya pembagian peran dan keterlibatan aktor dalam pelaksanaan program. Namun demikian, jejaring ini belum sepenuhnya berkembang menuju institusionalisasi substantif, yang seharusnya ditandai oleh keberadaan SOP lintas aktor yang terstandarisasi, koordinasi yang konsisten, serta otonomi kelembagaan yang lebih kuat bagi aktor pelaksana. Dengan demikian, penguatan aspek pelebagaan formal,

khususnya melalui penyusunan SOP lintas aktor, menjadi kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan jejaring kebijakan.

Berdasarkan hasil project map NVivo dan analisis teori jejaring kebijakan van Waarden (1992), dapat disimpulkan bahwa dimensi pelebagaan dalam jejaring kebijakan Program TPS3R Tanginas Bedas telah terbentuk secara formal dan berjenjang, namun belum sepenuhnya optimal secara substantif. Pelebagaan kuat terlihat pada aspek regulasi berjenjang, keanggotaan wajib bagi aktor tertentu, serta keberadaan unit kebijakan pusat di tingkat desa dan kabupaten. Namun demikian, pelebagaan masih lemah pada aspek standardisasi prosedur operasional, integrasi SOP lintas aktor, dan konsistensi mekanisme koordinasi, sehingga pelaksanaan program masih sangat bergantung pada praktik informal dan inisiatif aktor kunci.

5. Aturan Bertindak (*Rules of Conduct*)

Dimensi aturan bertindak dalam teori jejaring kebijakan van Waarden (1992) merujuk pada seperangkat konvensi interaksi atau “aturan main” yang mengatur bagaimana para aktor dalam jejaring berinteraksi, bertukar informasi, berkoordinasi, serta menyelesaikan perbedaan kepentingan. Aturan bertindak ini tidak selalu tertulis secara formal, tetapi terbentuk dari latar belakang institusional, persepsi peran, kepentingan, serta budaya administratif dan sosial para aktor yang terlibat.

Aturan bertindak dalam jejaring kebijakan TPS3R Tanginas Bedas menunjukkan bahwa pola interaksi antaraktor dibentuk oleh kombinasi aturan formal dan informal, dengan kecenderungan dominasi mekanisme informal dalam praktiknya. Secara formal, aturan bertindak bersumber dari Peraturan Desa yang mengatur pembentukan pengelola TPS3R, mekanisme operasional, pembiayaan melalui APBDes, serta kewajiban masyarakat dalam pemilahan sampah. Aturan ini memberikan legitimasi kelembagaan dan menjadi dasar normatif bagi pelaksanaan program. Namun, implementasi aturan formal tersebut belum sepenuhnya berjalan konsisten, terutama dalam aspek penegakan sanksi dan standardisasi prosedur lintas aktor.

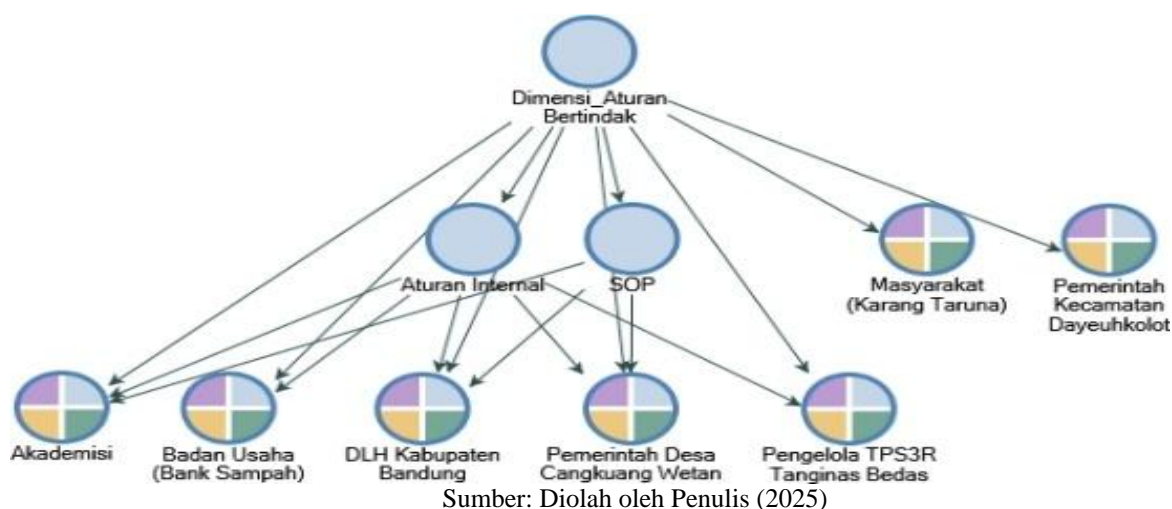
Secara empiris, dominasi aturan informal tercermin dari pola interaksi antaraktor yang lebih mengandalkan komunikasi langsung,

musyawarah, dan kesepakatan bersama. Hasil wawancara menunjukkan bahwa koordinasi antara pemerintah desa, pengelola TPS3R, dan masyarakat lebih sering dilakukan melalui pertemuan informal dan komunikasi personal, sementara mekanisme formal seperti prosedur tertulis atau forum resmi belum menjadi rujukan utama. Selain itu, penyelesaian perbedaan kepentingan dan konflik antaraktor cenderung dilakukan melalui mediasi oleh aktor kunci, khususnya Kepala Desa dan pengelola TPS3R, tanpa melalui prosedur formal yang

terstandarisasi.

Temuan ini diperkuat oleh hasil pemetaan NVivo yang menunjukkan bahwa aturan internal menjadi rujukan dominan dalam interaksi antaraktor, sementara SOP hanya berlaku terbatas pada aktor inti pelaksana dan belum terintegrasi secara lintas aktor. Ketiadaan SOP lintas aktor yang baku, khususnya di tingkat kecamatan dan desa, menyebabkan pola koordinasi berjalan secara ad hoc dan sangat bergantung pada kepemimpinan serta relasi personal antaraktor.

Gambar 4. Project Map Dimensi Aturan Bertindak Jejaring Kebijakan Program TPS3R Tanginas Bedas



Dengan demikian, aturan bertindak dalam jejaring kebijakan TPS3R Tanginas Bedas dapat dikategorikan sebagai kombinasi formal-informal dengan dominasi praktik informal. Meskipun pola ini memberikan fleksibilitas dan mendukung kelancaran operasional dalam jangka pendek, ketergantungan pada mekanisme informal berpotensi menimbulkan inkonsistensi, lemahnya akuntabilitas, serta ketergantungan pada aktor kunci dalam jangka panjang.

Penguatan aturan formal melalui penyusunan SOP lintas aktor dan standarisasi mekanisme koordinasi menjadi krusial untuk meningkatkan konsistensi, transparansi, dan keberlanjutan jejaring kebijakan. Ketergantungan yang tinggi pada norma informal dan relasi personal menunjukkan perlunya penguatan aturan formal dan standarisasi prosedur agar pola interaksi antaraktor menjadi lebih jelas, konsisten, dan berkelanjutan dalam jangka panjang (Zawojksa & Siudek, 2025).

6. Hubungan Kekuasaan (*Power Relations*)

Dalam jejaring kebijakan Program TPS3R Tanginas Bedas, hubungan kekuasaan terbentuk melalui distribusi kewenangan, penguasaan sumber daya, serta ketergantungan timbal balik antaraktor, sebagaimana dikemukakan oleh van Waarden (1992). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Cangkung Wetan, khususnya Kepala Desa, menempati posisi aktor paling dominan dalam jejaring. Dominasi ini bersumber dari tiga aspek utama, yaitu kewenangan formal sebagai pengambil keputusan di tingkat desa, kontrol terhadap alokasi anggaran melalui APBDes, serta legitimasi sosial-politik sebagai pemimpin lokal.

Secara empiris, hal ini tercermin dari peran pemerintah desa dalam menentukan arah kebijakan TPS3R, menginisiasi program, serta mengoordinasikan aktor lain dalam jejaring. Selain itu, akses terhadap sumber daya strategis, terutama pendanaan, sarana prasarana, dan

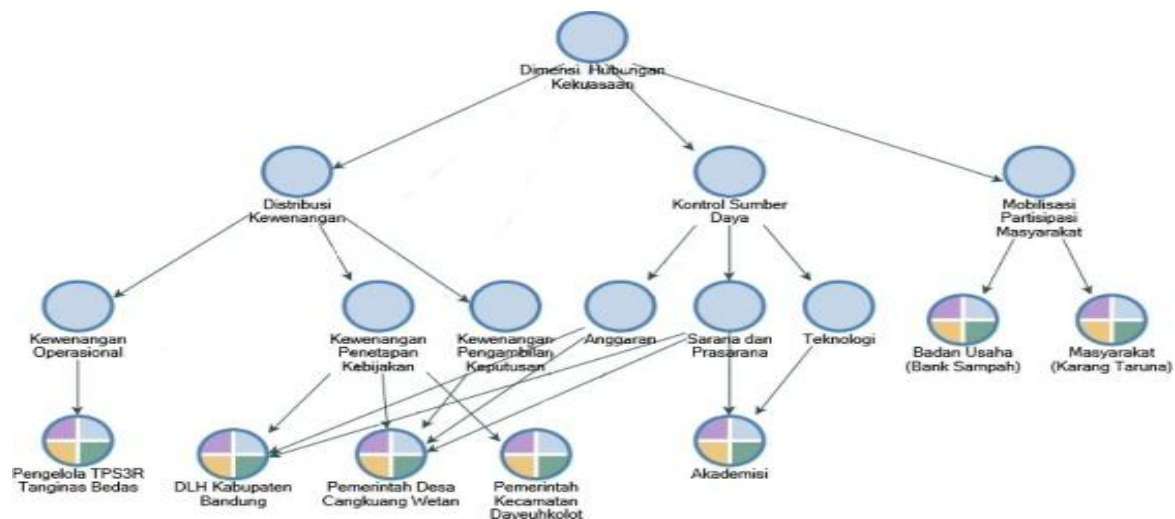
dukungan kelembagaan, sebagian besar dikendalikan oleh pemerintah desa, sehingga memperkuat posisi tawar dan pengaruhnya terhadap aktor lain.

Di tingkat kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung memiliki kekuasaan struktural berbasis kewenangan formal, terutama dalam penetapan standar teknis, pemberian pembinaan, serta pengawasan program. Namun demikian, pengaruh DLH dalam operasional TPS3R relatif terbatas, karena keterlibatannya lebih bersifat fasilitatif dan tidak langsung mengendalikan implementasi di tingkat desa. Pemerintah Kecamatan Dayeuhkolot memiliki kekuasaan administratif menengah yang berfungsi menjaga keterpaduan kebijakan secara vertikal melalui koordinasi dan fasilitasi lintas desa, meskipun tidak memiliki kontrol langsung terhadap sumber daya maupun

pengambilan keputusan strategis.

Aktor akademisi memiliki sumber kekuasaan berbasis pengetahuan dan teknologi, yang secara empiris terlihat dari kontribusinya dalam pendampingan teknis, pelatihan, serta pengembangan inovasi pengelolaan sampah. Meskipun tidak memiliki kewenangan formal, aktor ini tetap memiliki pengaruh dalam membentuk praktik operasional melalui transfer pengetahuan. Pengelola TPS3R memegang kekuasaan operasional karena mengendalikan implementasi kebijakan di lapangan, termasuk pengelolaan tenaga kerja, proses pengolahan sampah, serta interaksi langsung dengan masyarakat. Sementara itu, Bank Sampah dan Karang Taruna memiliki kekuasaan sosial dan partisipatif yang tercermin dari peran mereka dalam memobilisasi masyarakat, terutama dalam kegiatan pemilahan dan pengumpulan sampah.

Gambar 5. Project Map Dimensi Hubungan Kekuasaan Jejaring Kebijakan Program TPS3R Tanginas Bedas



Sumber: Diolah Penulis (2025)

Meskipun terdapat distribusi peran dan sumber daya antaraktor, hubungan kekuasaan dalam jejaring ini tidak sepenuhnya terdesentralisasi. Secara empiris, aliran sumber daya strategis, terutama pendanaan, legitimasi kebijakan, dan koordinasi antaraktor masih terkonsentrasi pada pemerintah desa. Hal ini juga terlihat dari fakta bahwa keputusan strategis terkait pengembangan program, alokasi sumber daya, serta kerja sama antaraktor sebagian besar ditentukan oleh pemerintah desa, sementara aktor lain lebih berperan dalam pelaksanaan dan dukungan teknis. Kondisi ini menunjukkan

adanya asimetri kekuasaan, di mana akses terhadap sumber daya dan pengaruh dalam pengambilan keputusan tidak terdistribusi secara merata, sehingga aktor non-pemerintah cenderung berada pada posisi subordinat dalam struktur jejaring.

Dengan demikian, hubungan kekuasaan dalam jejaring kebijakan TPS3R Tanginas Bedas dapat dikategorikan sebagai pola yang bersifat semi-terdesentralisasi dengan dominasi aktor pusat. Meskipun terdapat pertukaran sumber daya dan hubungan kooperatif antaraktor, distribusi kekuasaan yang belum

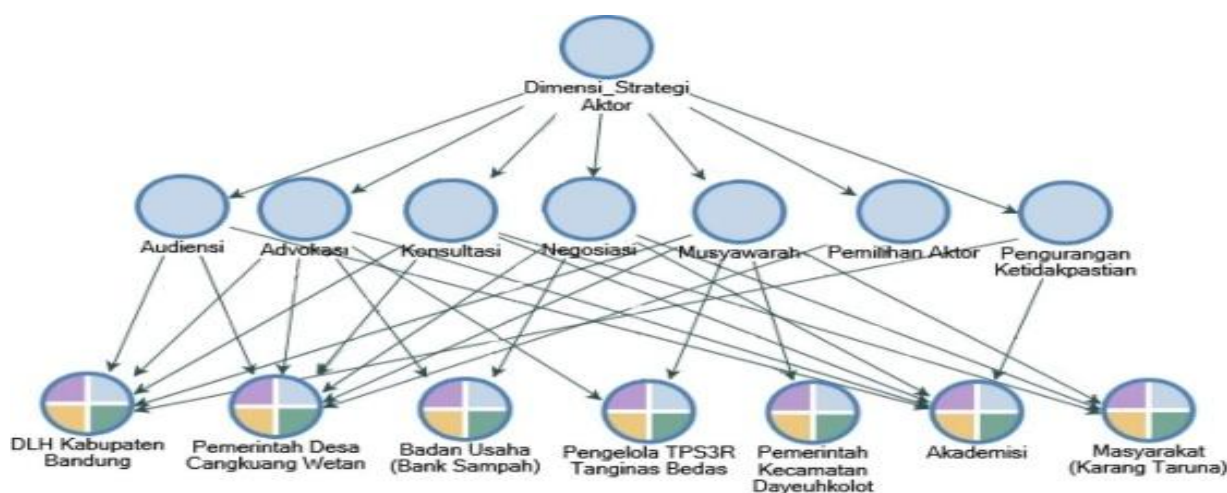
seimbang menunjukkan bahwa jejaring masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan tata kelola kolaboratif yang lebih inklusif dan setara.

7. Strategi Aktor (*Actors Strategies*)

strategi aktor dalam jejaring kebijakan TPS3R Tanginas Bedas menunjukkan peran aktif Pemerintah Desa Cangkuang Wetan, khususnya Kepala Desa, dalam menstrukturkan

jejaring melalui pemilihan aktor yang selektif berdasarkan tingkat keaktifan, kapasitas sosial, serta kesesuaian dengan tujuan program. Pemerintah desa tidak hanya berperan dalam mengoordinasikan pelaksanaan program, tetapi juga secara strategis menentukan aktor-aktor yang dilibatkan serta pola hubungan yang dibangun dalam jejaring.

Gambar 6. Project Map Dimensi Strategi Aktor Jejaring Kebijakan Program TPS3R Tanginas Bedas



Sumber: Diolah Penulis (2025)

Berbagai strategi digunakan, seperti musyawarah, konsultasi, negosiasi, audiensi, advokasi, dan pengurangan ketidakpastian, yang melibatkan pemerintah desa, DLH Kabupaten Bandung, akademisi, badan usaha (Bank Sampah), dan masyarakat. Strategi ini berfungsi untuk menyelaraskan kepentingan, memperkuat koordinasi lintas aktor dan level, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menjaga keberlanjutan program melalui evaluasi dan monitoring (Jariego, 2024).

Jejaring kebijakan TPS3R Tanginas Bedas menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Cangkuang Wetan, khususnya Kepala Desa, berperan aktif dalam proses strukturisasi jejaring. Pemerintah desa tidak hanya mengoordinasikan pelaksanaan program, tetapi juga secara strategis menentukan aktor-aktor yang dilibatkan dan pola hubungan yang dibangun.

Strategi pemilihan aktor tersebut sejalan dengan konsep akses selektif dan bias dalam teori van Waarden (1992), di mana aktor tertentu diberi ruang dan pengaruh lebih besar karena dianggap paling mendukung

tujuan kebijakan. aktor pemerintah desa, pengelola TPS3R Tanginas Bedas dan masyarakat lebih sering menggunakan pendekatan musyawarah untuk menyelaraskan kepentingan antaraktor. Strategi konsultasi juga menjadi pendekatan penting, khususnya dalam hubungan antara pemerintah desa DLH Kabupaten Bandung, Akademisi, dan masyarakat.

Secara keseluruhan, sesuai dengan kerangka teori jejaring kebijakan van Waarden (1992), strategi aktor TPS3R Tanginas Bedas mendukung pertukaran informasi, pengelolaan kepentingan, dan pemeliharaan kerja sama antaraktor. Hasil wawancara dengan beberapa aktor kunci menunjukkan bahwa aktor terlibat secara aktif dalam kegiatan operasional dan forum koordinasi. Selain itu, meskipun ada perbedaan pendapat antara aktor, sebagian besar aktor menunjukkan tingkat kepuasan yang relatif positif terhadap pola kolaborasi yang terjadi.

Dari aspek distribusi sumber daya, jejaring menunjukkan tingkat efektivitas yang

cukup memadai dalam mendukung operasional program, yang tercermin dari kelancaran kegiatan operasional TPS3R, ketersediaan sarana dan prasarana, serta frekuensi dukungan anggaran dari pemerintah daerah. Namun demikian, kondisi ini masih diwarnai oleh ketergantungan pada aktor tertentu, khususnya dalam penyediaan dukungan finansial dan operasional, yang terlihat dari dominasi kontribusi sumber daya oleh pemerintah desa dan pihak eksternal.

Di sisi lain, berbagai tantangan empiris juga teridentifikasi di lapangan, seperti belum meratanya partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah, keterbatasan kemandirian pendanaan, serta adanya ketimpangan kapasitas dan kekuasaan antaraktor. Oleh karena itu, meskipun strategi aktor telah berfungsi sebagai mekanisme koordinasi dan kolaborasi, efektivitas jejaring kebijakan TPS3R Tanginas Bedas masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek pemerataan peran, peningkatan partisipasi, dan keberlanjutan sumber daya.

SIMPULAN

Secara keseluruhan, jejaring kebijakan TPS3R Tanginas Bedas dapat dikategorikan sebagai jejaring yang kooperatif, relatif terlembaga secara formal, namun masih sentralistik dan belum sepenuhnya berkelanjutan. Jejaring ini cukup efektif dalam mendukung implementasi kebijakan di tingkat lokal, tetapi masih menghadapi tantangan struktural dalam hal pelebagaan pendanaan, optimalisasi fungsi mobilisasi masyarakat, serta distribusi peran dan sumber daya antaraktor.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan dan pembagian peran antaraktor masih diperlukan untuk menjamin keberlanjutan dan efektivitas kebijakan TPS3R di tingkat desa. Penelitian menunjukkan bahwa operasional TPS3R masih sangat bergantung pada dukungan anggaran pemerintah dan aktor tertentu, yang menunjukkan bahwa belum ada mekanisme pendanaan yang mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah masih rendah, menunjukkan bahwa mobilitas dan pendidikan belum terintegrasi dengan baik dalam jejaring. Selain itu, dominasi posisi

kepala desa dalam jaringan menunjukkan bahwa kekuasaan didistribusikan dengan tidak adil, yang dapat memengaruhi keberlanjutan program dalam jangka panjang.

Dalam meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan jejaring kebijakan TPS3R Tanginas Bedas, diperlukan sejumlah langkah strategis. Pertama, perlu ada peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pengembangan mekanisme pendanaan yang berkelanjutan melalui diversifikasi sumber pendanaan seperti iuran masyarakat, pengelolaan hasil daur ulang, dan kolaborasi dengan sektor swasta. Kedua, perlu ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan teknis, serta pembentukan mekanisme kerja yang lebih terstruktur.

Ketiga, penguatan peran masyarakat perlu dilakukan melalui strategi edukasi yang lebih sistematis dan berkelanjutan, peningkatan insentif partisipasi, serta pelibatan aktif komunitas lokal dalam proses pengambilan keputusan. Upaya ini penting untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah dari sumber. Keempat, meningkatkan peran aktor non-pemerintah dalam jejaring dan meningkatkan forum koordinasi antaraktor akan mengurangi ketergantungan pada aktor sentral. Dengan demikian, jejaring kebijakan mendukung pengelolaan sampah di tingkat desa secara adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, A. (2021). *Waste Management in Indonesia and Jakarta: Challenges and Way Forward*.
- Hossain, M. A., Ferdous, N., & Ferdous, E. (2024). Crisis-driven Disruptions in Global Waste Management: Impacts, Challenges and Policy Responses Amid COVID-19, Russia-Ukraine War, Climate Change, And Colossal Food Waste. *Environmental Challenges*, 14, 1–14.
<https://doi.org/10.1016/j.envc.2023.100807>
- Ismail, T., Ali, J., Muhammad, C. I., S Rachmad, A., A.M, M. Z., & Adiansah, W. (2025). Bank Sampah Wise Sebagai

- Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pasirtanjung, Lemah Abang, Karawang. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 8(3), 537 – 549. <https://doi.org/DOI:10.24198/responsive.v8i3.66929>
- Jariogo, I. M. (2024). Using Stakeholder Network Analysis to Enhance the Impact of Participation in Water Governance. *Humanities and Social Sciences Communications Volume*, 11(460), 1–6. <https://doi.org/https://doi.org/10.1057/s41599-024-02958-x>
- Leeuwen, J. van, & Surya, I. R. F. (2024). Network Power and Exclusion of Informal Waste Pickers when Plastic Flows Change: A Case Study of Community Waste Banks in Klaten Municipality in Indonesia. *Marine Policy*, 167, 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.marpol.2024.106285>
- Lexy J. Moleong. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mulyana, M., Pawan, A. P., & Maabuat, E. E. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Tondok Bakaru di Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 7(2), 16–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/j3p.v7i2.2929>
- Pambudi, N. F., Simatupang, T. M., Samarakoon, S. M. K., Mulyono, N. B., Ratnayake, R. M. C., & Okdinawati, L. (2025). Enhancing Public Participation in Plastic Waste Management for a Sustainable Circular Economy: Insights from Indonesia. *Journal of Material Cycles and Waste Management*, 27, 3366–3389.
- Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah.
- Pramuji, B. I. (2025). *Reformasi Kebijakan dan Tata Kelola Pengelolaan Sampah di Indonesia: Menuju Sistem yang Terintegrasi dan Berkelanjutan*. Fiskaldaerah.Com.
- Rhodes, R. A. . (2007). Understanding Governance: Ten Years on. *Organization Studies*, 28(08), 1243–1264.
- Ridder, H.-G. (2017). The Theory Contribution of Case Study Research Designs. *Business Research*, 10, 281–305. <https://doi.org/DOI10.1007/s40685-017-0045-z>
- Syaputra, M. F. (2025). Governance Network in Food Security Policy : a Study of the Lorong Wisata Program in Makassar City Jaringan Tata Kelola dalam Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan : Studi Program Lorong Wisata di Kota Makassar. *JAKP (Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik)*, 10(2), 297–324.
- Ultari, T., & Khoirunurrofik. (2024). The Role of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Village Development: Empirical Evidence from Villages in Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan The Indonesian Journal of Development Planning*, 8(2), 256–280. <https://doi.org/DOI:10.36574/jpp.v8i2.559>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- UNEP. (2016). *Global Waste Management Outlook*.
- Yohanes, Y., Akbar, H., Reza, H. T., Salsabila, N. P., & Mulyono, T. T. (2025). Kolaborasi Multi-Stakeholder Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Pontianak. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(02), 325–336.
- Zawojaska, A., & Siudek, T. (2025). The Role of Domestic Formal and Informal Institutions in Food Security : Research on the European Union Countries. *Sustainability*, 17(5), 1–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su17052132>